

ASPIRASI MASYARAKAT DAN SEKTOR BASIS DALAM PENGEMBANGAN PEKON UNGGULAN DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

Wisnu Satyajaya^{*)}, Novita Herdiana^{*)}

^{)} Staf Pengajar Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Lampung*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji potensi pertumbuhan ekonomi dengan mengidentifikasi aspek kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman pengembangan pekon pusat-pusat di Kabupaten Tanggamus. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif dengan metode survey. Informasi menggunakan data primer dan data sekunder, antara lain: data dan informasi mengenai karakteristik daerah meliputi kondisi infrastruktur, perekonomian dan potensi areal usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini meliputi analisis SWOT, Rapid Rural Appraisal (RRA), dan Location Quotient (LQ). Hasil penelitian menunjukkan: (1) penjaringan aspirasi masyarakat melalui Rapid Rural Appraisal menunjukkan dukungan yang kuat masyarakat terhadap pengembangan pekon pusat-pusat pertumbuhan berbasis ekonomi kerakyatan dengan skor penilaian 3.38; (2) Berdasarkan analisis LQ Kabupaten Tanggamus pada periode tahun 2011-2013, Kabupaten Tanggamus memiliki beberapa sektor basis, yaitu: sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Kata kunci: Aspirasi masyarakat, pengembangan pekon

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan antarwilayah terutama antara perkotaan dan pedesaan dan tantangan globalisasi (pasar bebas). Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada setiap daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk unggulannya (Nirmala dan Santoso, 2013).

Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, tentunya dengan tetap memperhatikan upaya penurunan kesenjangan yang ada. Karena itu setiap pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah.

Pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan tentang Kawasan Andalan sebagai suatu kawasan yang hendaknya dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan andalan juga diharapkan mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini diupayakan melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global dengan dukungan sumberdaya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

Pekon atau desa sebagai suatu bentuk kawasan, merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah dalam Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa diberikan kewenangan secara mandiri untuk merencanakan, mengelola dan mengatur pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa desa memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan.

Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.654,96 Km² yang terdiri 2.855,46 Km² daratan dan 1.799,50 Km² lautan. Kabupaten ini terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 209 pekon (desa) dan 3 kelurahan. Peran pekon di Kabupaten Tanggamus tentunya tidak dapat dikesampingkan. Hal ini terbukti dari dari PDRB Tanggamus 2013 dimana 51,29% berasal dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang diketahui berada di pedesaan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2014).

Program ekonomi kerakyatan merupakan unsur penting yang harus diwujudkan dalam menciptakan Kabupaten Tanggamus yang dicita-citakan pada Visi Kabupaten Tanggamus: “Terwujudnya Masyarakat Tanggamus yang Sejahtera, Agamis, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”. Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2011).

Program ekonomi kerakyatan juga hendaknya dapat mempertimbangkan keberlanjutan program yang dimiliki masyarakat. Sebagai contoh desa dikenal sebagai basis pertanian namun sering memiliki keterkaitan sektoral yang lemah dengan industri pengolahan hasil pertanian (Hidayat, Sutandi, dan Tjahjono, 2014).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, alam, finansial dan kelembagaan yang ada. Pada konteks daerah, pemilihan kompetensi seharusnya mempertimbangkan kondisi daerah dengan tetap memperhatikan kriteria persaingan seperti: adanya nilai tambah yang tinggi, adanya sifat yang unik, adanya keterkaitan dan peluang untuk bersaing di pasar luar daerah (bahkan internasional). Dengan kata lain, pemilihan dan penentuan kompetensi seharusnya memberi dampak yang besar dalam memberi stimulus perekonomian daerah. Yang lebih penting lagi hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya daerah (Austin, 1992).

Sumberdaya yang ada di daerah harus berpartisipasi dalam pengembangan daerah. Peran yang dapat dilakukan adalah a). Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan; b). Pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan; c). Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan; d). Akademisi memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan e). Pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama (Suharyanto dan Sofianto, 2012).

Agar konsep pengembangan pekon pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Tanggamus berhasil, dibutuhkan model-model pengembangan pekon dengan konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang menyeluruh dapat mengidentifikasi potensi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pengembangan pekon.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan tipe deskriptif dengan metode survey. Informasi menggunakan data primer dan data sekunder, antara lain: data dan informasi mengenai karakteristik daerah meliputi kondisi infrastruktur, perekonomian dan potensi areal usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Penelitian ini menghimpun informasi dari seluruh kecamatan yang ada dengan mempertimbangkan keterwakilan dari karakteristik wilayah secara geografis, jumlah pekon, kontribusi pembentukan PDRB kabupaten/kota serta kebijakan pemerintah daerah. Jumlah wilayah kecamatan yang tercakup dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Analisis data primer dan sekunder dilakukan dalam rangka menjawab tujuan penelitian. Untuk menjawab tujuan pertama, analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif, tabulasi silang, dan statistik deskriptif.

Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan membedah kasus sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*threat*). Analisis SWOT ini kemudian dijadikan sebagai informasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam menjalankan programnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil serangkaian keputusan strategik. Sesuai dengan kajian yang ditetapkan, setelah Identifikasi Faktor Internal kekuatan (*strength*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang atau kesempatan (faktor Eksternal *Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) ditemukan, selanjutnya dilakukan penilaian Faktor Kunci Keberhasilan.

Rapid Rural Appraisal (RRA)

Pengumpulan data dilakukan menggunakan Rapid Rural Appraisal (RRA), berupa pendekatan partisipatif untuk memperoleh informasi dan penilaian dalam waktu yang relatif pendek. Metode RRA ini digunakan dengan menggunakan penelusuran pada sumber informasi secara mendalam dan lengkap tentang aspek yang diteliti (Freudenberger, 1999; Chambers, 1996).

Location Quotient (LQ)

Teknik analisis ini dilakukan untuk menentukan sektor basis yang dimiliki oleh Kabupaten Tanggamus. Perhitungan LQ dilakukan dengan perhitungan atas dasar PDRB dengan rumus:

$$LQ = (X_{ij}/X_j) / (Y_i/Y)$$

Keterangan:

LQ = Indeks *Location Quotient*

X_{ij} = Nilai PDRB sektor i di Kabupaten Tanggamus

X_j = Nilai PDRB total di Kabupaten Tanggamus

Y_i = Nilai PDRB sektor i di Provinsi Lampung

Y = Nilai PDRB total di Provinsi Lampung

Interpretasi untuk *Quotient* lokasi adalah:

Jika LQ > 1; maka sektor terhitung dikatakan sektor basis

Jika LQ = 1; maka dikatakan suatu sektor mendekati sebagai sektor basis

Jika LQ < 1; maka dikatakan sektor terhitung bukan merupakan sektor basis

PEMBAHASAN

Analisis SWOT Pengembangan Pekon Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanggamus

Analisis SWOT dilakukan untuk menghasilkan informasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan program, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil serangkaian keputusan strategik dalam mencapai tujuan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dapat dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor (internal maupun eksternal) yang bisa berupa kekuatan maupun kelemahan dan peluang maupun ancaman. Rincian hasil analisis SWOT disampaikan berikut ini.

• Analisis Faktor Internal

Kekuatan (*strengths*) yang berpotensi dikembangkan adalah sebagai berikut.

- a. Hasil budidaya dan pengolahan yang memberikan keuntungan, yang didukung oleh ketersediaan bahan baku dan teknologi yang tidak rumit.
- b. Ketersediaan lahan dan bahan baku yang cukup tersedia dan mudah didapatkan oleh rumah tangga petani sebagai pelaku dalam pengembangan pekon pusat pertumbuhan.
- c. Ketersediaan RTRW yang telah menetapkan kawasan kecamatan dan pekon pertumbuhan dengan sektor unggulannya.
- d. Motivasi yang kuat dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi melalui perbaikan usaha dan penghidupan yang layak.

Kelemahan (*weaknesses*) yang harus menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan para petani yang umumnya rendah.
- b. Pengetahuan dan keterampilan para petani tentang teknologi rakyat masih rendah.

- c. Kurangnya tingkat adopsi teknologi rakyat pekon yang menyebabkan produk yang dihasilkan masih dalam bentuk bahan mentah (belum memiliki nilai tambah).
- d. Pengetahuan akan manajemen usaha yang masih rendah
- e. Kemampuan modal petani yang umumnya rendah serta akses permodalan khususnya UMKM yang belum “*bankable*”
- f. Kurangnya jaringan distribusi yang berpihak pada rakyat dalam mendukung pemasaran hasil usaha rakyat.

• Analisis Faktor Eksternal

Peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut.

- a. Program pemerintah pusat yang menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas dalam pembangunan nasional termasuk dalam hal alokasi dana
- b. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sangat besar terhadap pengembangan pekon pusat pertumbuhan rakyat.
- c. Keberadaan kawasan maritim Kabupaten Tanggamus yang memungkinkan akses yang seluas-luasnya dengan wilayah luar.
- d. Adanya peluang penerapan alat dan mesin pertanian serta pengolahan hasil pertanian unggulan, baik dalam hal budidaya, panen, pasca panen, dan industri makanan.
- e. Adanya peluang pemasaran hasil komoditas unggulan dan produk olahannya.
- f. Masih besarnya kebutuhan konsumen dan daya serap pasar komoditas unggulan dan hasil olahannya.

Ancaman (*treaths*) yang dihadapi dalam pengembangan pekon pusat pertumbuhan diantaranya:

- a. Kebijakan pemerintah yang kurang membatasi impor khususnya komoditas pertanian dan tanaman pangan.
- b. Rendahnya akses pemasaran petani dalam memasarkan produk hasil panen tidak terlepas dari kondisi lokasi yang cukup jauh dari lokasi pasar dan infrastuktur yang kurang memadai.
- c. Keinginan untuk maju dan kurangnya tingkat pengetahuan ditambah lagi dengan peran tengkulak yang cukup dominan yang menjadikan kondisi petani menjadi lemah. Petani biasanya menjual hasil ke tengkulak dengan harga yang kurang maksimal.

Aspirasi Masyarakat terhadap Pengembangan Pekon Pusat Pertumbuhan

Aspirasi (*aspiration*) dapat dimaknai sebagai *the act of aspiring* atau atau berkeinginan; *strong desire for realization* atau hasrat yang kuat untuk merealisasikan; dan *condition strongly desired* atau kondisi yang sangat diinginkan. Dari makna tersebut, aspirasi dapat dijelaskan sebagai gejala psikologis yang berkaitan dengan tindakan, kondisi dan realisasi dari suatu yang diharapkan, dicita-citakan, diinginkan maupun dihasratkan. Aspirasi yang muncul merupakan jawaban dan sekaligus tantangan terhadap kenyataan ekonomi, lingkungan dan sosio kultural yang melingkupinya. Hasil penjarangan aspirasi masyarakat terhadap pekon pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tanggamus ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program pengembangan pekon pusat pertumbuhan melalui program ekonomi kerakyatan dengan total rata-rata 3,38. Aspirasi masyarakat terhadap pertanyaan mengenai dampak yang diharapkan dari pengembangan pekon pusat pertumbuhan berupa: adanya peningkatan taraf ekonomi,

terpenuhinya kebutuhan hidup, tersedianya lapangan kerja bagi seluruh masyarakat, tingkat pengangguran yang rendah yang jika dipadukan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan hidup bagi masyarakat pekon pusat-pusat pertumbuhan.

Tabel 1. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat terhadap Pengembangan Pekon Pusat Pertumbuhan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Tanggamus

No	Aspirasi	Rata-rata Skor Penilaian
1	Pemerintah mendesain program pekon pusat pertumbuhan di daerah anda	3.25
2	Perlunya peraturan dalam pengembangan pekon pusat pertumbuhan di daerah	3.50
3	Keterlibatan masyarakat pekon dalam mendesain pengembangan pekon pusat pertumbuhan	3.55
4	Kebutuhan mendapatkan informasi tentang perkembangan pekon pusat pertumbuhan	3.40
5	Keinginan untuk mengembangkan industri/peningkatan nilai tambah terhadap produk/usaha anda	3.18
Rata-rata		3,38

Keterangan:

4 = Sangat perlu

3 = Perlu

2 = Tidak Perlu

1 = Sangat Tidak Perlu

Sumber: Data Primer (diolah)

Penjaringan aspirasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa perlu adanya legalitas yang kuat untuk mengatur program pengembangan pekon pusat pertumbuhan (3,50). Terlebih juga masyarakat memiliki harapan bahwa mereka dilibatkan dalam mendesain pengembangan pekon pusat pertumbuhan yang dapat dimaknai pengembangan pekon harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki pekon tersebut.

Selanjutnya responden juga menunjukkan keinginan untuk adanya kesinambungan sehingga mengharapkan selalu mendapatkan informasi tentang perkembangan pekon pusat pertumbuhan (3,55). Hal ini juga dapat dimaknai bahwa perlu adanya pembinaan pada program yang berjalan khususnya pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya. Rata-rata skor penilaian terhadap aspirasi juga menunjukkan bahwa responden merasa perlu adanya pengembangan terhadap peningkatan nilai tambah terhadap produk/pekerjaan yang dimiliki (3.18).

Beberapa responden ada yang menilai bahwa kurang merasa perlu untuk peningkatan nilai tambah yang menunjukkan mereka telah berada dalam zona nyaman akan usaha yang mereka lakukan, namun persepsi ini tetap perlu diubah mengingat perkembangan usaha yang cenderung dinamis dan berfluktuasi. Apalagi jika dikaitkan dengan siklus hidup

produk yang pada suatu waktu bisa saja mengalami kejenuhan atau berada pada siklus menurun.

Rata-rata prioritas dalam pelaksanaan pengembangan pekon pusat pertumbuhan menurut responden adalah dengan urutan sebagai berikut ini.

- a. Infrastruktur (fasilitas) khususnya sarana prasarana transportasi, fasilitas sosial. Termasuk di dalamnya adalah aspek pendanaan/permodalan
- b. Peningkatan kualitas SDM khususnya dalam peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknologi berkaitan dengan bidang usaha
- c. Pelayanan pemerintah khususnya dalam hal kemudahan birokrasi
- d. Promosi daerah dalam memperluas jangkauan relasi dan perluasan pasar
- e. Lainnya. Bervariasi dengan jawaban diantaranya: bantuan pemasaran produk, stabilitas harga, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan.

Mengenai bidang unggulan yang mereka inginkan untuk dikembangkan, responden memberikan jawaban bervariasi sesuai dengan bidang usaha yang saat ini dijalani. Tentunya ini berarti analisis terhadap potensi dan penyesuaian dengan RTRW yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Analisis Location Quotient

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai sektor yang mempunyai peranan besar dalam menunjang pembangunan perekonomian di suatu daerah. Analisis LQ ini dapat menentukan sektor basis dan non basis. Sektor basis diartikan sebagai sektor dengan kegiatan ekonomi yang hasil produksinya dapat melayani pasar baik dalam maupun di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan (bersifat lokal).

Analisis ini menggunakan PDRB Kabupaten Tanggamus dan PDRB Provinsi Lampung. Apabila hasil perhitungan memberikan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis. Hasil perhitungan LQ Kabupaten Tanggamus ditunjukkan pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil analisis LQ Kabupaten Tanggamus pada periode tahun 2011-2013, Kabupaten Tanggamus memiliki beberapa sektor basis, yaitu: sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Jika dihubungkan dengan topik kajian yang dilakukan, sektor yang sangat berkaitan dengan ekonomi kerakyatan maka sektor pertanian dapat menjadi prioritas utama dengan pertimbangan bahwa sektor lain (sektor listrik, gas, dan air bersih; perdagangan, hotel, dan restoran; serta keuangan, persewaan, dan jasa perumahan) yang walaupun menjadi sektor basis di Kabupaten Tanggamus namun memiliki kebutuhan investasi yang relatif besar dan lebih sesuai diaplikasikan oleh pelaku industri besar.

Sektor pertanian tidak dapat dipungkiri telah menjadi sektor andalan dalam struktur perekonomian Kabupaten Tanggamus dengan kontribusi 51,29% pada tahun 2013. Sektor pertanian yang menjadi basis ini adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya serta perikanan sedangkan sektor kehutanan belum dapat digolongkan sebagai sektor basis karena nilai LQ-nya masih di bawah 1.

Tabel 2. *Location Quotient* Kabupaten Tanggamus

No	LAPANGAN USAHA	Nilai LQ PDRB Kabupaten Tanggamus		
		2011	2012*	2013**
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1.74	1.74	1.69
	a. Tanaman Bahan Makanan	1.05	1.05	1.02
	b. Tanaman Perkebunan	4.68	4.45	4.36
	c. Peternakan	1.16	1.13	1.09
	d. Kehutanan	0.52	0.51	0.49
	e. Perikanan	1.87	1.90	1.86
2	Pertambangan dan Penggalian	0.35	0.46	0.70
3	Industri Pengolahan	0.21	0.21	0.20
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.96	1.87	1.85
5	Konstruksi	0.54	0.57	0.06
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.24	1.15	1.18
7	Transportasi dan Komunikasi	0.67	0.67	0.67
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.30	2.32	2.41
9	Jasa-jasa	0.58	0.62	0.59

*) Angka Revisi **) Angka Sementara

Sumber: BPS Tanggamus dan Provinsi Lampung (diolah)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan analisis yang dilakukan berkaitan dengan pengembangan pekon pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tanggamus dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (a) penjarangan aspirasi masyarakat melalui *rapid rural appraisal* menunjukkan dukungan yang kuat masyarakat terhadap pengembangan pekon pusat-pusat pertumbuhan berbasis ekonomi kerakyatan dengan skor penilaian 3.38; (b) identifikasi komponen SWOT menunjukkan aspek kekuatan (*strengths*) yang berpotensi dikembangkan yakni diantaranya (1) hasil budidaya dan pengolahan yang didukung oleh ketersediaan bahan baku dan teknologi yang tidak rumit, (2) ketersediaan lahan dan bahan baku yang cukup tersedia dan mudah didapat, (3) ketersediaan RTRW, dan (4) motivasi yang kuat dari masyarakat. Sedangkan aspek kelemahan (*weaknesses*) yang harus menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan yakni: (1) pendidikan para petani yang umumnya rendah, (2) pengetahuan dan keterampilan para petani tentang teknologi rakyat masih rendah, (3) kurangnya tingkat adopsi teknologi rakyat pekon yang menyebabkan produk yang dihasilkan masih dalam bentuk bahan mentah (belum memiliki nilai tambah), (4) pengetahuan akan manajemen usaha yang masih rendah, (5) kemampuan modal petani yang umumnya rendah serta akses permodalan khususnya

UMKM yang belum “bankable”, dan (6) kurangnya jaringan distribusi yang berpihak pada rakyat dalam mendukung pemasaran hasil usaha rakyat. Adapun aspek peluang (*opportunity*) yang dapat dimanfaatkan mencakup: (1) program pemerintah pusat yang menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas dalam pembangunan nasional termasuk dalam hal alokasi dana, (2) dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sangat besar terhadap pengembangan pekon pusat pertumbuhan rakyat, (3) Keberadaan kawasan maritim Kabupaten Tanggamus dan adanya peluang penerapan alat serta mesin unggulan, (4) permintaan yang tinggi atas pemasaran hasil komoditas unggulan dan produk olahannya, dan (5) besarnya kebutuhan dan daya serap komoditas unggulan dan hasil olahannya. Sedangkan, aspek ancaman (*treath*) yang dihadapi dalam pengembangan pekon pusat pertumbuhan diantaranya: (1) tingginya impor khususnya komoditas pertanian dan tanaman pangan, (2) rendahnya akses pemasaran petani dalam memasarkan produk hasil panen, dan (3) kurangnya tingkat pengetahuan ditambah lagi dengan peran tengkulak yang cukup dominan yang menjadikan kondisi petani menjadi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.E. (1992). *Agroindustrial project analysis*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. (2014). *Tanggamus dalam angka 2014*. BPS Kabupaten Tanggamus.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. (2014). *Statistik daerah Kabupaten Tanggamus 2014*. BPS Kabupaten Tanggamus.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2012). *Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Lampung*. BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2014 *Produk domestik regional bruto Provinsi Lampung menurut lapangan usaha 2010-2014*. BPS Provinsi Lampung.
- Chambers, R. 1996. *Participatory rural appraisal: memahami desa secara partisipatif*. Yogyakarta: Oxfam – Kanisius.
- Freudenberger, K.S. (1999). *Rapid rural appraisal (rra) and participatory rural appraisal (pra): a manual for CRS field workers and partners*. Catholic Relief Services, Baltimore, Maryland, U.S.A.
- Hidayat, E., A, Sutandi., dan Tjahjono, B. 2014. *Kajian wilayah pengembangan industri kecil berbasis komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Majalengka*. Majalah Ilmiah Globe. Vol 16(2) Desember. Hal 101-108.
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

- Nirmala, R.R.W., Santoso, E.B. 2013. *Keterkaitan komoditas unggulan antar desa kota dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Pacet-Mojokerto*. Jurnal Teknik POMITS Vol 2(2): 149-152.
- Pemerintah Kabupaten Tanggamus. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor. 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031*. Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- Suharyanto, dan Sofianto, A. 2012. *Model pengembangan desa terpadu inovatif di Jawa Tengah*. Jurnal Bina Praja. Vol 4 (4): Hal 251-260.